KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN AIR DALAM PENGEMBANGAN LAHAN RAWA LEBAK

Gatot Irianto
Direktur Pengelolaan Air
Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air
Departemen Pertanian

PENDAHULUAN

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden di Jatiluhur, Jawab Barat pada tanggal 11 Juni 2005, merupakan *entry point* yang menjanjikan bagi sektor agro dan derivatnya untuk mengambil posisi dan membuktikan perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pangan dalam arti luas sebagai konsekuensi laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tantangan mendasarnya adalah, bagaimana memompa segala potensi sumberdaya yang tersedia: manusia, alam, modal dan pasar agar bersinergi untuk memberikan resultante maksimalnya secara berkelanjutan dengan resiko paling minimum. Pilihan untuk merevitalisasi pertanian ini sangat tepat, karena, pengalaman empiris menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang mampu mencapai tahapan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan digerakkan oleh sektor industri dan jasa berbasis teknologi modern, tanpa didahului dengan membangun sektor pertanian yang tangguh.

Tantangan fundamentalnya adalah: bagaimana revitalisasi pertanian itu dilakukan dan apa yang harus direvitalisasi terlebih dahulu agar nilai tambah yang dihasilkan maksimal, cepat dengan belanja pemerintah (*goverment expenditure*) paling minimum? Pertanyaan tersebut menjadi sangat penting, karena dengan peningkatan jumlah penduduk dengan laju 1,6% per tahun akan membawa konsekuensi peningkatan permintaan jumlah kebutuhan akan bahan pangan, sandang dan papan yang pasti akan berdampak terhadap peningkatan tekanan terhadap daya dukung lahan. Diprediksikan bahwa Indonesia akan mengalami defisit beras mencapai 17,36 juta ton dengan penduduk 300 juta jiwa pada tahun 2025. Terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian dengan laju sekitar 110 ribu ha dalam kurun waktu tahun 2000-2004. Belum lagi masalah rusaknya daerah aliran sungai (DAS), terjadinya anomali iklim dan lain sebagainya akan menjadi resultante masalah bagi kelangsungan hidup bangsa. Permasalahan-permasalahan tersebut diatas akan masalah tersendiri di tengah upaya kita memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Lahan rawa lebak yang saat ini masih *underutilized* dengan senjang (*gap*) produksi aktual dan potensialnya masih besar merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan. Pertanyaan mendasarnya adalah: mengapa kinerja lahan rawa lebak relatif sangat jauh tertinggal dibandingkan lahan sawah? Kendala apa yang harus dipecahkan agar *constraint* tersebut berubah menjadi *opportunity*? Benarkan kendala pengembangan lahan rawa lebak terletak pada masalah teknis dan bukan masalah sosial dan ekonominya? Pertanyaan lebih jauh, benarkah model penanganan lahan rawa lebak yang kita lakukan selama ini sudah

berada pada jalur yang benar (*in the correct treck*)? Diperlukan kejujuran kita bersama untuk menjawab pertanyaan tersebut, termasuk melepaskan ego sektor dan subsektornya, agar pelaksanaan pengembangan lahan rawa lebak tidak memunculkan pemaksaan dan "pemerkosaan" petani yang sebagian besar sudah lama menderita menuruti setiap keinginan pemerintah.

POTENSI DAN PERMASALAHAN LAHAN LEBAK

Lahan lebak adalah lahan yang rejim airnya dipengaruhi oleh topografi dan hujan, baik yang turun setempat maupun di daerah sekitarnya dan mempunyai topograpi yang relatif rendah (cekung). Potensi luas lahan lebak berdasarkan studi dari Bank Dunia tahun 1998 adalah sekitar 13,316 juta ha, yang tersebar di Pulau Sumatera seluas 2,786 juta ha, Kalimantan seluas 3,580 juta ha dan Papua seluas 6,305 juta ha (Gambar 1). Berdasarkan data Gambar 1, terlihat bahwa dengan potensi lahan lebak yang sangat luas, maka apabila sekitar 10% saja dapat dikelola dengan baik dengan intensitas tanam meningkat dari 0 kali menjadi 1 kali, maka dapat menghasilkan produksi padi sekitar 2.663.200 ton atau 5.326.400 ton dari 1 kali menjadi 2 kali tanam dengan rata-rata produktivitas 2 ton/ha. Hasilnya akan terjadi lompatan produksi yang sangat signifikan, apabila produktivitasnya bisa direalisasikan mencapai 3 ton/ha atau bahkan 4 ton/ha sehingga produksi pangan nasional dapat ditingkatkan secara meyakinkan.

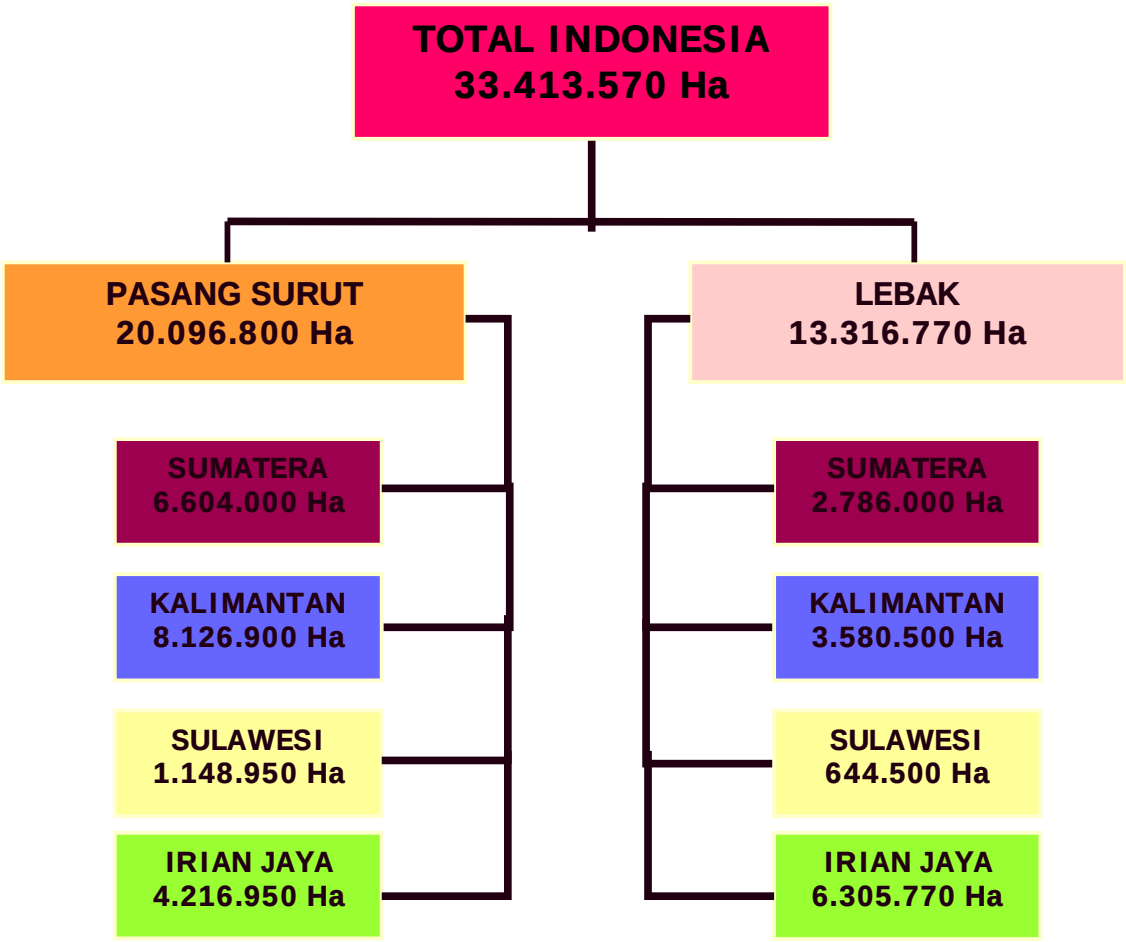

Gambar 1. Luas Lahan Rawa di Indonesia

Sumber : Badan Litbang Pertanian, 1998.

Usaha-usaha untuk mengembangkan dan mengelola lahan rawa lebak khususnya untuk sektor pertanian memang menjadi persoalan yang memerlukan penanganan yang serius dan hati-hati. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, karena rawa lebak mempunyai kendala atau faktor penghambat diantaranya yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kendala tersebut antara lain:

a. Umumnya mempunyai rejim air yang fluktuatif dan sulit diduga serta resiko kebanjiran (*flooding*) di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Dengan kondisi biofisik yang demikian, maka pengembangan lahan rawa lebak untuk usaha pertanian khususnya tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dalam skala luas memerlukan pengelolaan lahan dan air serta penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayahnya (*spesifik lokalita*) agar diperoleh hasil yang optimal.
b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kelembagaan dan prasarana pendukung yang umumnya belum memadai (kurang/belum berjalan) atau bahkan belum ada. Terutama menyangkut kejelasan kepemilikan lahan, keterbatasan tenaga (petani sambilan) dan

modal kerja serta sarana produksi, prasarana dan sarana irigasi dan perhubungan serta pasca panen (*post harvesting*) dan pemasaran hasil pertanian.

c. Dijumpai adanya kemampuan pemerintah daerah dan petani yang belum sepenuhnya memahami bagaimana karakteristik dari lahan rawa lebak dan juga teknologi yang tersedia dan cocok dalam pengelolaan lahan dan air untuk pertanian yang mempunyai kearifan lokal (*local wisdom*).
d. Adanya penanganan yang tidak serius dalam pengelolaan lahan rawa lebak baik menyangkut dokumentasi, administrasi dan teknologi yang telah dan pernah dilakukan oleh masyarakat lokal maupun pendatang dalam suatu area tertentu, sehingga tidak adanya acuan yang dapat dipedomani dalam pengembangan lahan rawa lebak pada lokasi lain.
e. Masih dijumpai penanganan pengelolaan rawa lebak secara sektoral tanpa melibatkan dari berbagai unsur sehingga tidak terintegrasi atau kurangnya dukungan dari sektor-sektor atau pihak-pihak terkait lainnya.

PENGELOLAAN AIR LAHAN RAWA LEBAK

Lahan rawa lebak yang merupakan dataran banjir sungai dengan beda muka air antara musim hujan dan musim kemarau lebih dari 2 m disamping itu juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 5 m di atas permukaan laut. Daerah lebak ini adalah daerah *entrapped/encloced inundation* dimana dibagian lain merupakan daerah tinggi dengan ketinggian hingga 20 m, sehingga fisiografinya merupakan cekungan dengan batas daerah tinggi yang berlereng 4–10%, dengan kata lain tidak ada pengaruh nyata dari pasang surut air laut.

Air sungai yang melimpahi dataran rawa lebak miskin sulfat, sehingga dataran rawa lebak tidak memperlihatkan endapan sulfida seperti pada daerah pasang surut. Lahan rawa lebak adalah merupakan sebagian kecil sekitar 5% areal dari ekosistem DAS, dimana terdapat pengendapan bahan yang diangkut air dari perbukitan.

Tanah rawa lebak umumnya tergolong alluvial hidromorf dan gley humus rendah. Berdasarkan kedalaman dan lamanya genangan, maka lahan rawa lebak dibedakan manjadi 3 (tiga) tipe:

1. **Lebak Pematang/Dangkal**:
   Daerah yang terletak dibagian yang lebih tinggi dimana saat menjelang akhir musim hujan daerah ini sering kali airnya sudah surut dan telah dapat diusahakan, tetapi cepat sekali mengalami kekeringan. Biasanya tinggi genangan airnya kurang dari 50 cm selama kurang dari 3 bulan.
2. **Lebak Tengahan:**
   Daerah pada bagian cekungan yang umumnya pada pertengahan musim kemarau masih digenangi air tetapi mengering pada masa panen. Dengan tinggi genangan airnya antara 50-100 cm selama 3-6 bulan.

3. **Lebak Dalam:**
   Daerah pada bagian cekungan dalam dimana surutnya air lebih lambat sehingga pada masa panen masih terdapat genangan air di petakan sawah. Lebak ini mempunyai tinggi genangan airnya lebih dari 100 cm selama lebih dari 6 bulan.

Lebak pematang dan lebak tengahan cocok untuk diusahakan pertanaman padi dan palawija, tetapi untuk rawa lebak dalam biasanya diusahakan untuk kolam ikan dan usahatani ikan dan peternakan itik baik petelur maupun pedaging ataupun ternak kerbau rawa jika memungkinkan.

Untuk itu sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut, maka langkah-langkah yang harus perhatikan adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi dan pengelompokan wilayah lebak berdasarkan tipologi lahan, biologi dan fisik lahan, sistem usahatani yang *existing*, kelembagaan serta sarana dan prasarana yang tersedia. Informasi-informasi ini sangat penting dikumpulkan yang menyangkut jenis dan kondisi tanah yang dipetakan dengan disertai area yang tergenang kapan, berapa lama, serta dalamnya genangan. Sistem usaha tani yang meliputi pemanfaatannya, pola usahatani (*farming system*) dan penerapan teknologinya, hasil dan pendapatan dari komoditas yang diusahakan, ketersediaan modal untuk berusaha tani, sarana produksi dan pemasaran hasil, keterlibatan petani/kelompok tani dalam koperasi dan masalah-masalah yang dihadapi sekaligus potensi dan prospek serta kendala pengembangan lahan rawa lebak. Informasi sarana dan prasarana juga dikumpulkan yang menyangkut tata letak dan fungsi saluran, keadaan saluran meliputi panjang dan jarak antar saluran serta dimensi penampang saluran, letak dan kondisi pintu air atau bangunan air lainnya, operasi dan pemeliharaan jaringan air, luas cakupan lahan dan penataannya, dan persepsi dan saran petani mengenai penyempurnaan tata airnya.
2) Desain dan rancangan pengembangan
   Dari hasil identifikasi dan pengelompokan wilayah lebak baik dari aspek biofisik dan hidrotopografinya, maka rancangan dan desain pengelolaan lahan rawa lebak dapat dibuat dengan prinsip kesesuaian lahan dengan memperhatikan kawasan permukiman, kawasan budidaya baik untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan maupun perikanan. Selain itu juga harus menyisakan area atau kawasan konservasi, sehingga jelas dimana area yang selalu tergenang, tempat bangunan irigasi, arah dan sumber air irigasi, pintu-pintu air, saluran pemberi dan pembuang (*drainase*), *area water retention*, jalan usaha tani, rancangan pola tanam (padi – padi, padi – palawija dan padi – hortikultura). Tidak kalah pentingnya untuk memberikan contoh pengembangan atau pemanfaatan lahan rawa lebak yang optimal, maka model pengembangan harus diinstall di area yang mempunyai karakteristik berbeda-beda, sehingga model ini dapat diadopsi oleh para penyuluh maupun petani sekitar lokasi, karena mereka dapat melihat langsung cara pengelolaannya. Hal penting yang mesti diperhatikan juga adalah pengembangan suatu lahan rawa lebak tidak akan mematikan kebiasaan yang telah dilakukan oleh petani atau masyarakat yang mempunyai nilai positif (*indegenous knowledge*), karena tiap lokasi atau daerah mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda sehingga penanganan yang diaplikasikan juga memperhatikan spesifik lokasi. Sebaliknya hal-hal

yang bernilai negatif yang ada dimasyarakat kita arahkan untuk menjadi nilai positif yang sangat bermanfaat bagi pengembangan lahan rawa lebak lebih lanjut.

3) Penumbuhan kelembagaan, peningkatan pengetahuan dan partisipasi petugas dan petani.

   Penumbuhan kelembagaan penunjang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat oleh dari dan untuk petani/kelompok tani sangat diperlukan tentunya dengan partisipasi aktif mereka. Kelembagaan tersebut dapat berupa kelembagaan petani, P3A, sarana produksi, pelayanan jasa alsintan, pasca panen dan pemasaran hasil serta keuangan atau permodalan.

   Peningkatan pengetahuan yang berupa pelatihan dan pembinaan secara intensif pada area model meliputi sekolah lapang dan temu lapang bagi petani/kelompok tani sangat diperlukan, demikian juga pelatihan bagi petugas baik dari semua tingkatan seperti TOT untuk petugas propinsi, pelatihan aspek teknis pengelolaan lahan lebak oleh petani untuk petugas kabupaten serta pelatihan bagaimana mendorong dan mengaktifkan kembali partisipasi petugas dan petani dalam pengelolaan lahan lebak.

4) Monitoring dan evaluasi

   Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan hal paten yang mesti harus ada karena merupakan deliniasi tujuan maupun arahan pengembangan lahan lebak agar tidak melenceng dari yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan harus dilengkapi informasi sebelum (*before*) dan sesudah (*after*) proyek baik ruang (*spatial*) maupun waktu (*temporal*). Kegiatan ini akan dapat dievaluasi sehingga ke depan dapat dibuat skenario-skenario pengembangan lanjutannya.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LAHAN RAWA LEBAK

Paling tidak ada tiga aspek penting yang harus dilakukan perubahan mendasar berkaitan dengan revitalisasi lahan rawa lebak : (1) revitalisasi sumberdaya manusia (jumlah, jenis dan kualitas), (2) program dan (3) pendanaan.

1. Revitalisasi Sumberdaya Manusia

Salah satu kekeliruan besar yang pernah dilakukan kita bersama dalam pengembangan lahan rawa lebak adalah: tidak seimbangnya antara ketersediaan tenaga kerja dengan program dan pendanaan yang tersedia. Pada tahun 1980 an pemerintah membuka secara besar besaran lahan rawa tanpa diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Berkaitan dengan kondisi sumberdaya manusia (SDM) petani, maka tanpa peningkatan jumlah petani pengelola rawa yang signifikan, maka lahan rawa akan tetap seperti sekarang ini. Apalagi, sebagian besar lahan rawa umumnya merupakan daerah terpencil (*remote area*) yang aksebilitasnya minimal, sehingga posisi lahan rawa menjadi kurang menarik bagi siapapun, kecuali orang yang benar benar memiliki motivasi tinggi dan atau terpaksa.

Secara berjenjang, maka kebutuhan SDM lahan rawa lebak, maka ada tiga komponen yang harus dipenuhi: (1) SDM pelaksana lapang (petani), SDM penyuluh dan SDM pengelola (pengambil kebijakan, perencana dan pengembang). Rendahnya minat petani untuk bekerja di lahan rawa lebak didasari fakta bahwa, meskipun produk pertanian

yang dihasilkan sangat menjanjikan, karena biaya angkut mahal, maka nilai tambah produksi tidak bisa dinikmati petani. Kondisi ini menyebabkan minat masyarakat untuk mengembangkan lahan rawa lebak sangat terbatas. Jumlah petani/transmigran yang meningggalkan lahan rawa jumlahnya paling banyak dibandingkan transmigrasi untuk agroekosistem non rawa. Kondisi ini harus dipecahkan bersama apabila lahan rawa lebak akan diberdayakan potensinya. Logika praktisnya dalam pengembangan lahan rawa lebak adalah: bagaimana lahan rawa lebak memiliki daya tarik untuk ditingali oleh siapapun baik petani maupun non petani. Melalui pendekatan ini, maka pemerintah tidak hanya berbicara sektor pertanian saja, melainkan juga sudah melakukan pendekatan menyeluruh tentang pengembangan wilayah termasuk mengintegrasikan sektor industri, perdagangan dan jasa serta perhubungan yang seringkali justru menjadi kendala utamanya.

Berkaitan dengan pemenuhan jumlah, jenis dan mutu, maka pemerintah propinsi, kabupaten. kota yang memiliki lahan rawa lebak potensial harus segera melakukan terobosan khusus dalam penyediaan tenaga kerja. Sangat tidak mungkin mengharapkan tenaga kerja yang ada saat ini untuk membangunkan lahan rawa lebak yang jumlahnya begitu luas dengan berbagai kendalanya. Tanpa usaha signifikan dalam pemenuhan tenaga kerja di lahan rawa lebak, maka masalah pengembangan lahan rawa lebak hanya dibahas dalam seminar dan tidak pernah diselesaikan akar persoalannya. Paling tidak jumlah pengelola lahan rawa lebak yang ada harus dilipatkan 5 (lima) kali dari jumlah yang ada saat ini agar pengaruhnya dapat dilihat dalam waktu lebih cepat. Dalam masa transisi, maka pemerintah harus memulai mekanisasi pertanian sebagai upaya percepatan kemampuan pengolahan lahan agar capaian luas tanam, produksi dan produktivitas lahan dapat dioptimalkan. Berkaitan dengan sumberdaya manusia, pertanyaannya: adalah kapan dan bagaimana mekanisme penyediaannya, siapa dan berbuat apa?

Untuk mengembangkan kualitas SDM penyuluh, maka di setiap propinsi yang memiliki areal rawa lebak potensial harus mengembangkan sekolah bagi penyuluh khusus yang menekuni lahan rawa lebak sebagai bidang unggulannya. Rekruitmen itu dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota agar mereka yang mempunyai pendidikan khusus di bidang rawa lebak mendapatkan perhatian lebih khusus dalam pengembangannya. Kearifan lokal dalam pengembangan lahan rawa lebak dapat dijadikan model pendekatan dan pengembangan *indigenous knowledge* dalam mengelola lahan rawa lebak pada skala yang lebih luas dan menjanjikan. Teknologi berbasis kearifan lokal ini harus dieksplor secara maksimal agar mempunyai dampak maksimal bagi pengembangan lahan rawa lebak. Rasa rendah diri (*inferiority*) atas teknologi asing (*western technology*) harus secepatnya dihilangkan, karena dipastikan teknologi berbasis kearifan lokal sudah teruji dan terbukti. Pemerintah bersama masyarakat harus secepatnya mendiseminasikannya dan mengimplementasikannya pada skala yang lebih luas.

Terbatasnya SDM pelaksana ini diperburuk dengan terbatasnya sumberdaya manusia yang bergerak dalam penelitian dan pengembangan serta penyuluhan di lahan rawa lebak. Terbatasnya produk teknologi baik jenis, jumlah dan mutu serta diseminasinya menyebabkan teknologi pengembangan lahan rawa lebak baru bisa “dinikmati oleh penelitinya” dan belum banyak memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Keterbatasan dalam melakukan *up scalling* ini harus direspon semua pihak baik direktorat jenderal teknis maupun pemerintah propinsi dan kabupaten/kota agar

kesenjangan antara teknologi hasil penelitian dan yang diaplikasikan petani dapat diminimalkan.

Untuk mengembangkan kemampuan pengelolaan lahan rawa lebak, maka diperlukan sumberdaya manusia yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Saat ini sedang dikembangkan program khusus pengelolaan lahan rawa kerjasama antara Universitas Sriwidjaya dengan IHE Delf-UNESCO. Penyediaan tenaga khusus yang expert di bidang pengelolaan lahan rawa ini dimaksudkan agar tersedia tenaga trampil yang secara khusus dididik dalam mengelola lahan rawa secara dini, sehingga pemahaman aspek fundamental tentang lahan rawa dapat dikuasai lebih mendalam.

2. Revitalisasi Program

Secara praktis revitalisasi program pengembangan lahan rawa dapat dilakukan berdasarkan master plan program yang dikeluarkan oleh Bappenas (Gambar 2). Melalui master plan yang jelas, maka setiap sektor dapat mengambil posisi dan peran strategisnya untuk pengembangan lahan rawa, sehingga memunculkan sinergi dan bukan sebaliknya kontradiksi. Keputusan politis pengembangan rawa lebak ini harus didengungkan dan dikampanyekan terus menerus agar pamornya tidak terkalahkan dengan lahan sawah atau lahan kering.

Berkaitan dengan revitalisasi program, maka dalam berbagai kesempatan telah ada kesepahaman bahwa tanpa ada koordinasi yang harmonis antar pemangku kepentingan, program ini tidak akan berjalan mulus sesuai yang diharapkan.

LOWLAND MANAGEMENT PLAN

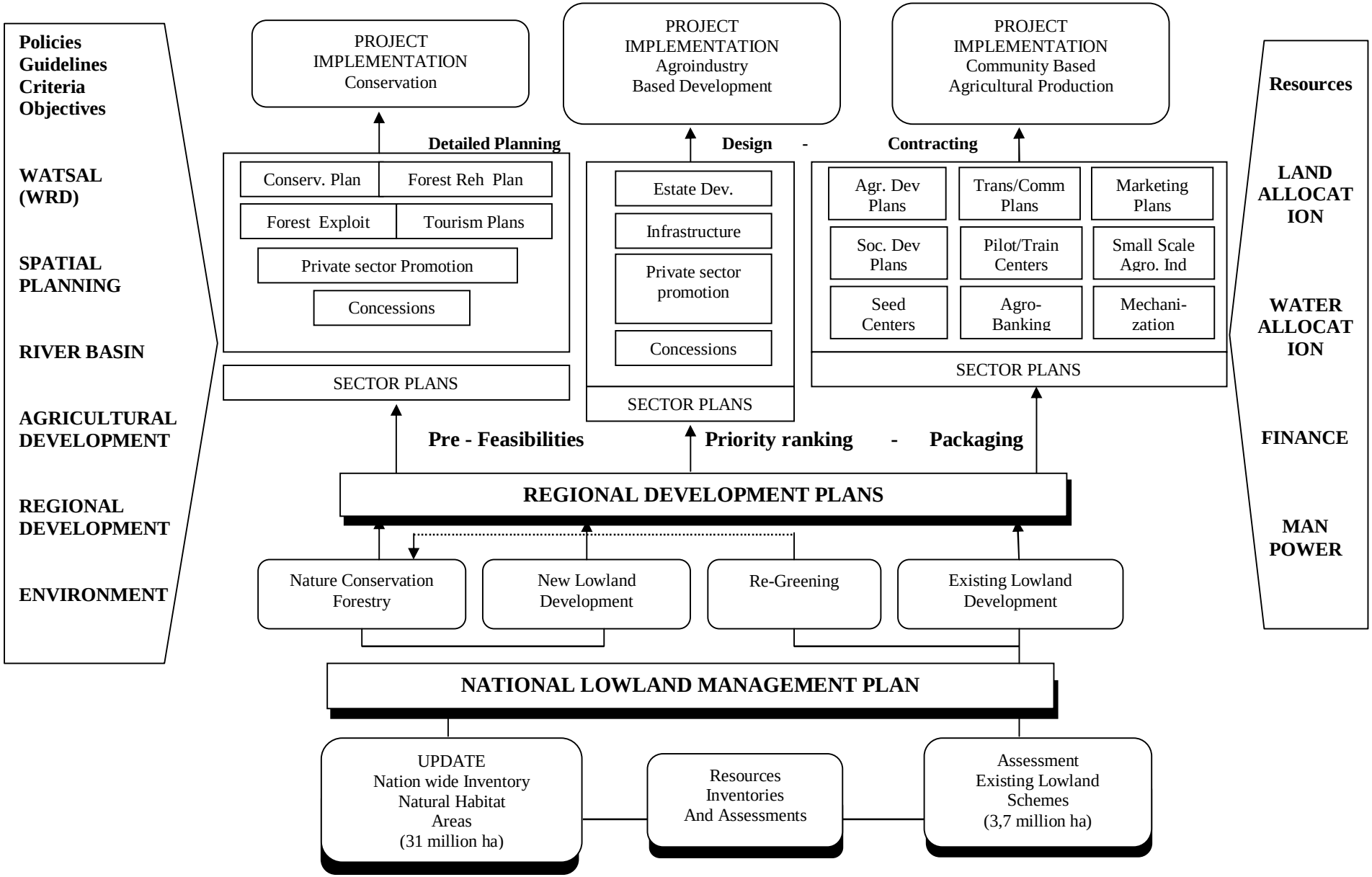

Untuk mengimplementasikan pelaksanaan master plan tersebut, maka diperlukan:

a. ***Pendekatan terpadu dan menyeluruh*** dalam pengelolaan lahan rawa lebak dari semua aspek sangat diperlukan, sehingga semua dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi secara sinergis dan serasi antar semua *stakeholder*. Kata koordinasi dan keterpaduan ini menjadi kunci (*key point*) keberhasilan walaupun kata ini mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan, namun ini harus dimulai kalau tidak kita akan ketinggalan kereta.
b. ***Partisipatif dari semua unsure atau stakeholder*** harus dilibatkan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya, sehingga semua pihak yang terlibat akan merasa ikut bertanggung jawab dan memiliki (*sense of belonging*) yang akan terjalin kerjasama dan rasa untuk saling berupaya mendukung dan mendorong keberhasilannya.
c. ***Setiap lokasi dan wilayah memiliki keragaman biofisik dan social budaya*** termasuk kearifan local (*indigenous knowledge*) yang berbeda. Untuk itu, pengelolaan dan pengembangan lahan rawa lebak harus dilakukan berdasarkan pendekatan spesifik lokasi (*site specific approach*). Sebagai contoh masyarakat yang tadinya memanfaatkan lahan rawa lebak dengan membuat area penangkapan ikan dengan memanfaatkan surutnya air lebak menuju ke sungai tidak harus dimatikan penghidupannya setelah dibangun atau dikembangkan lahan lebak baru, malahan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI Sumatera Selatan memasukkan penangkapan ikan tersebut kedalam PAD.
d. ***Pemilihan wilayah dan komoditi harus selektif dan bertahap*** ini artinya bahwa wilayah dan komoditi yang akan dikembangkan harus mempunyai keberhasilan sesuai dengan tujuan, teknologi dan sumberdaya yang tersedia tentunya yang mempunyai kearifan lokal disesuaikan dengan potensi dan keterbatasan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia.
e. Pembagian ***peran yang jelas antar stakeholder*** dan sekaligus menciptakan ***pola penyediaan dana pemerintah*** dalam rangka pengelolaan terpadu.

3. Revitalisasi Pendanaan

Revitalisasi pendanaan telah dilakukan secara signifikan oleh departemen pertanian dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air yang di dalamnya terdapat Direktorat Pengelolaan Air. Secara signifikan alokasi dana pengelolaan air sekitar 60% dari total Direktorat Jenderal PLA. Sedangkan khusus untuk tata air mikro (TAM) mencapai sekitar 20% dari dana tersebut, sehingga secara operasional, dukungan pendanaan pengelalaan lahan rawa sudah in line dengan semangat untuk pengembangan lahan rawa. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program pengelolaan air, maka dipilih program padat karya sebagai terobosannya. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari mengapa program padat karya dipilih:

Pertimbangan yuridis

pengembangan padat karya produktif dilandasi ***Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 40 ayat (2)*** yang berbunyi**:**

”*penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja***”.**

Dengan demikian, padat karya produktif secara yuridis tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku bahkan bersinergi dengan pertimbangan teknis ekonomis serta pertimbangan sosialita.

Pertimbangan teknis-ekonomisnya

Pelaksanaan program padat karya produktif (PPKP) memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan program pemerintah lainnya. Menurut Bupati Purwakarta, paling tidak ada 3 (tiga) keunggulan PPKP yang perlu mendapatkan perhatian: (a) rehabilitasi jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) akan berpengaruh langsung terhadap akselerasi peningkatan produksi pertanian dan ekonomi masyarakat (b) terjadinya sinergi antar petani dan antar kelompok, sehingga meningkatkan nilai tambah hasil (*added value result*) ekonomi dan sosial dibandingkan biaya riel PPKP (c) peningkatan efisiensi pemanfaatan dana, karena hampir semua uang dibelanjakan langsung di lapangan yaitu: ke petani, buruh tani sebesar 80% dalam bentuk upah dan sisanya dalam bentuk belanja materialnya 20% yang semuanya berasal dari lokasi setempat.

Pertimbangan sosialnya

Antara lain: (a) terbukanya peluang yang setara (*equality*) antara petani, buruh tani dan non tani dalam mengakses program dan dana, sehingga konflik antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah seperti pada program bantuan langsung tunai (BLT) dapat direduksi secara signifikan (b) peningkatan partisipasi individu dan kelompok tani dalam mengelola jaringan irigasi karena tingginya rasa memiliki (*self ownership*) dan rasa tanggungjawab (*self responsibility*), sehingga JIDES dan JITUT akan lebih berkelanjutan. Respon sosial yang positif dari pelaksanaan PPKP terlihat langsung dari raut muka yang cerah saat penyerahan dana PPKP, karena menurut mereka selama ini pembangunan di wilayah tersebut lebih banyak dilaksanakan oleh pihak ke III. Akibatnya, masyarakat lebih banyak sebagai penonton, karena proporsi uang yang dibelanjakan di lokasi kegiatan relatif sedikit dibandingkan pagu dananya. Sementara masuknya dana segar melalui PPKP di masyarakat akan langsung memutar ekonomi petani lebih cepat dan efisien.

Masalah fundamental yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan lahan rawa adalah: belum optimalnya pemanfaatan dana tersebut, sehingga nisbah keluaran terhadap asupannya perlu ditingkatkan lagi. Melalui dana tugas pembantuan, yang pelaksana dan dananya ada di daerah, maka sebenarnya peran dan tanggung jawab propinsi dan kabupaten/kota terhadap keberhasilan pengembangan lahan rawa lebak sangat besar.

PENUTUP

Lahan rawa lebak merupakan gadis pedalaman cantik yang belum terjamah modernisasi, sehingga kilau dan gemilaunya terkesan jauh dibandingkan lahan sawah yang sudah lama dipoles dengan investasi tenaga, waktu dan dana yang sangat besar. Pengalaman di dalam negeri dalam pengelolaan lahan rawa perlu dijadikan teladan bagaimana mengelola lahan rawa lebak secara benar dan berkelanjutan. Investasi paling mahal yang harus dilakukan pemerintah dalam pengembangan lahan rawa lebak adalah investasi sumberdaya manusia yang berkualitas, program yang *down to the earth* dan pendanaan yang proporsional dibandingkan lahan sawah atau lahan kering. Melalui azas proporsionalitas ini, maka akan memunculkan energi dan semangat serta motivasi baru bagi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan lahan rawa lebak. Tanpa

stimulant yang memadai, maka pengembangan lahan rawa lebak akan hanya dibicarakan pada pertemuan ilmiah saja dan tidak pernah dilaksanakan di lapangan.

Peran dan komitmen pemerintah pusat sudah sangat jelas dalam penentuan prioritas pengembangan lahan rawa lebak. Saat ini yang diperlukan adalah tanggungjawab implementasi program dari dana yang sudah sepenuhnya di desentralisir ke propinsi, kabupaten/kota. Tanpa komitmen tersebut, maka investasi tenaga, waktu dan dana yang sudah dilakukan akan sia sia tanpa memberikan efek ganda yang bermakna.

Aspek penting lain yang perlu mendapatkan dukungan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, kota adalah pengembangan infrastruktur lahan rawa lebak yang sangat marginal dan kebijakan harga. Pengembangan infrastruktur yang proporsional akan mengaselerasi dan memecahkan persoalan ikutan yang selama ini tidak dapat disentuh secara sektoral. Masalah harga dapat tertolong, manakala biaya angkutan dari sentra produksi ke pusat perdagangan *reasonable*, sehingga kebijakan stabiliasi harga melalui pengembangan infrastruktur dan kebijakan perdagangan akan sangat diperlukan dalam pengembangan lahan rawa lebak untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik. Mari kita laksanakan bersama sesuai dengan tugas dan kompetensi kita.